

# URGENSI KURIKULUM PENDIDIKAN KEBENCANAAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA

Mirza Desfandi

Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Email: mirza\_des@yahoo.com

## Abstract

*This article was written to give an idea of the urgency of disaster education curriculum based on local wisdom in Indonesia. For that purpose, the author uses the method of literature. As a country which has enormous potential for disaster, Indonesia needs to implement a disaster curriculum in educational institutions so that students have the knowledge and insight about the disaster. This disaster education have a common goal to provide an overview and reference in the learning process of disaster preparedness. Through education students are expected to be able to think and act fast, precise, and accurate in the face of disaster. Empathy toward victims can also be constructed so that learners can help others appropriately and carefully. Pattern and diversity of natural disasters faced also vary because each region has different characteristics as well. Then, disaster curriculum should accommodate local wisdom, as an effort to provide appropriate education to deal simultaneously with a disaster. Curriculum based on local wisdom will explain the relationship between humans and the natural environment and cultural environment around them.*

*Keywords: disaster education curriculum, local wisdom*

## Abstrak

Artikel ini menjelaskan urgensi kurikulum pendidikan kebencanaan berbasis kearifan lokal di Indonesia. Untuk maksud tersebut penulis menggunakan metode kepustakaan. Sebagai negara yang memiliki potensi bencana sangat besar, Indonesia perlu menerapkan kurikulum kebencanaan di lembaga-lembaga pendidikan agar peserta didik memiliki pengetahuan dan wawasan tentang kebencanaan. Pendidikan kebencanaan ini memiliki tujuan umum untuk memberikan gambaran dan acuan dalam proses pembelajaran siaga bencana. Melalui pendidikan diharapkan peserta didik mampu berpikir dan bertindak cepat, tepat, dan akurat saat menghadapi bencana. Sikap empati terhadap korban bencana juga dapat dibangun agar peserta didik dapat membantu orang lain secara tepat dan cermat. Pola dan ragam bencana alam yang dihadapi juga berbeda-beda karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Maka, kurikulum bencana harus mengakomodasi kearifan lokal yang ada, sebagai upaya memberikan pendidikan yang tepat untuk menghadapi sekaligus menangani bencana. Kurikulum berbasis kearifan lokal akan menjelaskan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya yang ada di sekitarnya.

**Kata kunci:** kurikulum pendidikan kebencanaan, kearifan lokal

### A. Pendahuluan

Berbagai bencana di Indonesia sebagian besar terkait secara langsung dengan proses geologi (geological seperti gempa bumi dan vulkanisme, proses hidro-meteorologi (hydrometeorological) seperti kekeringan, kebakaran, longsor, abrasi, erosi, angin topan, banjir, dan lain-lain. Dilihat dari letak dan kondisi fisik, Indonesia merupakan negara yang

memiliki resiko tinggi bagi terjadinya bencana karena secara geologis terletak pada pertemuan Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Semua itu membentuk rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, yang bertemu di Indonesia, tepatnya di Laut Banda, Maluku. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan bentuk topografi yang bervariasi.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bencana, dengan karakteristik yang berbeda, sehingga penanganan terhadap setiap bencana pun berbeda. Untuk itu, identifikasi karakteristik dan potensi bencana baik secara nasional maupun lingkungan sekitar, sangat diperlukan pengetahuan untuk pengurangan risiko bencana. Pemahaman tentang dinamika di permukaan bumi (alam dan manusia), yang semuanya membentuk sistem spesifik. Bencana alam di suatu wilayah memiliki implikasi secara langsung terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Partisipasi masyarakat untuk mengurangi dan menghindari risiko bencana penting dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat.<sup>1</sup>

Masyarakat menjadi objek utama saat terjadi bencana, seharusnya masyarakat mempunyai kemampuan untuk mengetahui kerentanan yang ada, sehingga dapat menjadi pelaku (subjek) utama dalam usaha-usaha pengurangan risiko bencana, sehingga kerugian dapat diminimalisir. Hal itu hanya dapat terjadi jika masyarakat mempunyai perencanaan untuk mengurangi risiko bencana dan mempunyai pengetahuan serta mengerti tentang apa yang seharusnya dilakukan pada saat bencana belum terjadi (prabencana), pada saat tanggap darurat, dan pada saat pasca bencana. Pentingnya peningkatan pemahaman dan ketahanan terhadap bencana itu harus ditanamkan kepada masyarakat sekitar, terutama anak di usia dini yang masih belum mengerti tentang hal-hal apa yang harus mereka lakukan saat peristiwa bencana tidak terduga terjadi.

Masyarakat merupakan elemen yang memiliki pengalaman langsung dalam kejadian bencana sehingga pemahaman yang dimiliki menjadi modal bagi pengurangan risiko bencana.<sup>2</sup> Dalam konteks manajemen bencana alam, respon masyarakat terhadap bencana sangat penting untuk dipahami. Respon merupakan awal dari sebuah strategi adaptasi oleh masyarakat yang dihasilkan melalui pemahaman terhadap bencana alam yang terjadi.

Pemahaman masyarakat berupa pengetahuan persepsi yang teraktualisasi dalam sikap dan atau tindakan dalam menghadapi bencana. Hasil dari sikap dan/atau tindakan masyarakat dalam menghadapi bencana adalah strategi adaptasi yang berarti penyesuaian yang dilakukan akibat dari ancaman lingkungan.<sup>3</sup>

Wilayah Indonesia banyak gunung api, memberikan banyak pengalaman empiris tentang kejadian bencana yang membawa korban. Dari pengalaman ini, masyarakat lokal umumnya memiliki pengetahuan lokal, kearifan dalam memprediksi dan melakukan mitigasi bencana alam di daerahnya. Pengetahuan lokal tersebut diperoleh dari pengalaman akibat berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagai contoh, masyarakat yang bermukim di lereng Gunung Merapi, di Jawa Tengah, telah mempunyai kemampuan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya letusan. Selain masih kuatnya keyakinan spiritual, masyarakat di sana biasanya membaca tanda-tanda alam melalui perilaku hewan, seperti turunnya hewan-hewan dari puncak atau keluar dari rimbu hutan, burung-burung atau hewan lainnya mengeluarkan bunyi suara yang tidak biasa, atau adanya pohon-pohon di sekeliling kawah yang kering dan layu.

Berdasarkan hal tersebut, disadari bahwa pemahaman tentang bencana alam harus dimiliki oleh semua orang. Diperlukan upaya konkret dalam memahami dan mengantisipasi kondisi alam secara terpadu. Salah satu wujudnya, melalui upaya pengurangan risiko bencana yang berbasis komunitas. Pendidikan menjadi salah satu sarana yang efektif untuk mengurangi risiko bencana dengan memasukkan materi pelajaran tentang bencana alam sebagai pelajaran wajib bagi setiap siswa di semua tingkatan, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah risiko bencana. Kurikulum yang berbasis kearifan lokal, diharapkan dapat diterima dan dapat dengan mudah di pahami oleh siswa.

## B. Pembahasan

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang

1 Suryanti, dkk. 2010. *Motivasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Multirisiko Bencana di Kawasan Kepesisiran Parangtritis dalam Penaksiran Multirisiko Bencana di Wilayah Kepesisiran Parangtritis, Yogyakarta*. Yogyakarta: PSBA Universitas Gadjah Mada.

2 M. Zein, A. 2010. *Community Based Approach to Flood Hazard and Vulnerability Assessment in Flood Prone Area: A Case Study in Kelurahan Sewu, Surakarta City, Indonesia*. Thesis, ITC, The Netherland.

3 Su Rito Hardoyo. 2011. *Strategi Adaptasi Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir Pasang Air Laut di Kota Pekalongan*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.<sup>4</sup> Pengertian bencana ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya risiko dampak bencana bergantung pada kerentanan setiap komponen yang terkena dampak. Hal ini seperti yang diungkap *Hyogo Framework for Action 2005-2015*, bahwa risiko bencana akan meningkat dengan adanya kerentanan fisik, sosial ekonomi, dan lingkungan. Sebelumnya para ahli telah mengungkap tentang tiga sistem utama yang mengalami kerugian akibat bencana yaitu lingkungan fisik (*physical environment*), sosial kependudukan (*socio-demographic*), dan lingkungan terbangun (*built environment*).<sup>5</sup> Karakteristik dari ketiga sistem tersebut menentukan derajat atau tingkat kerugian dari sebuah bencana alam. *Hyogo Framework for Action 2005-2015*, mengungkap bahwa kerugian bencana akan semakin besar oleh kerentanan yang disebabkan oleh perubahan demografi, kondisi sosial ekonomi dan teknologi, pembangunan pada zona bahaya tinggi, degradasi lingkungan, perubahan iklim, bahaya geologi, kelangkaan sumberdaya, dan dampak epidemi. Bencana dikategorikan 3 jenis, yaitu:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.<sup>6</sup>

Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana bertujuan untuk: (1) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, (2) menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, (3) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, (4) menghargai budaya lokal, (5) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, (6) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, dan (7) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Terdapat 4 fase dalam penanganan bencana, yaitu *prevention/mitigation, preparedness, response dan recovery*. *Pertama, prevention/Mitigation* adalah serangkaian upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya) misalnya melarang pembakaran hutan dalam perladangan dan melarang penambangan batu di daerah curam. *Kedua, preparedness* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Misalnya: Penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi, rencana Kontinjensi, dan sosialisasi peraturan/pedoman penanggulangan bencana. *Ketiga, response* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. *Keempat, recovery* adalah proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Upaya yang dilakukan adalah

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

5 D.S. Mileti & L.P. Gottschlich, Hazards and Sustainable Development in the United States. *Journal Risk Management*, Vol. 3, No. 1: 61-70, 2001.

6 *Ibid*<sup>4</sup>

memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar (jalan, listrik, air bersih, pasar, puskesmas, dll).<sup>7</sup>

Mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana, atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta. Dalam melakukan tindakan mitigasi bencana, langkah awal yang kita harus lakukan ialah melakukan kajian risiko bencana terhadap daerah tersebut. Dalam menghitung risiko bencana sebuah daerah kita harus mengetahui bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas (*capacity*) suatu wilayah yang berdasarkan pada karakteristik kondisi fisik dan wilayahnya. Mitigasi bencana merupakan kewajiban berbagai pihak, pemerintah, para ahli dan masyarakat.<sup>8</sup> Pengenalan dan pemahaman bencana, proses terjadinya, dan penilaian merupakan tugas para ahli. Pengetahuan, pemahaman dan kesiapsiagaan perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat mengantisipasi, mengatasi, dan meminimalkan kerugian.

Kegiatan mitigasi bencana hendaknya merupakan yang bersifat rutin dan berkelanjutan (*sustainable disaster mitigation*). Kegiatan mitigasi seharusnya sudah dilakukan dalam periode jauh-jauh hari sebelum kejadian bencana, yang seringkali datang lebih cepat dari waktu-waktu yang diperkirakan, dan bahkan memiliki intensitas yang lebih besar dari yang diperkirakan semula. Selain itu pemerintah hendaknya juga aktif memberikan berbagai arahan yang tepat dan berkesinambungan dalam menghadapi peristiwa bencana atau dengan kata lain bisa beradaptasi dengan resiko potensi bencana alam yang ada.

Dalam konteks pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana juga dipahami sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana untuk menghilangkan atau mengurangi akibat dari ancaman dan tingkat bencana. Sektor pendidikan merupakan penentu dalam pengurangan risiko bencana. Karena itu diperlukan upaya konkret Pada tahun 2011 Kementerian Pendidikan Nasional telah mulai menerapkan kurikulum bencana

mulai jenjang pendidikan SD hingga SMA. Namun pada praktiknya tidak dimasukkan langsung jadi mata pelajaran atau kurikulum khusus bencana, tetapi dimasukkan ke dalam mata pelajaran secara faktual dalam memahami dan mengantisipasi kondisi alam secara terpadu.<sup>9</sup> Salah satu wujudnya, melalui upaya pengurangan risiko bencana yang berbasis komunitas, dan pendidikan sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mengurangi risiko bencana dengan memasukkan materi pelajaran tentang bencana alam sebagai pelajaran wajib bagi setiap siswa di semua tingkatan, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah risiko bencana.

Pendidikan kebencanaan dapat disisipkan pada mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, Agama atau juga mata pelajaran yang lain. Pendidikan kebencanaan ini memiliki tujuan umum untuk memberikan gambaran dan acuan dalam proses pembelajaran siaga bencana. Guru dan kepala sekolah mendapat pendidikan dan pelatihan untuk dapat menerapkan pendidikan dan keterampilan siaga bencana. Melalui pendidikan ini diharapkan siswa mampu berpikir dan bertindak cepat, tepat, dan akurat saat menghadapi bencana. Sikap empati terhadap korban bencana juga dibangun agar siswa dapat membantu orang lain. Pendidikan yang diberikan tidak mencakup bencana sosial seperti kerusuhan dan tawuran. Hanya seputar bencana alam saja. Edukasi bencana dapat dilaksanakan dengan tiga cara. Apabila kebutuhan sekolah hanya sekadar pengetahuan saja, maka bahan ajar akan berintegrasi dengan mata pelajaran. Bisa masuk dalam pelajaran yang memiliki kaitan seperti geografi dan pengetahuan alam. Jika kebutuhan dirasa perlu mencakup pelatihan, maka dapat dimuat dalam muatan lokal dan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH). Pelaksanaan pendidikan dapat pula meluas hingga kegiatan ekstrakurikuler.

Pembelajaran bencana yang telah dilaksanakan sekarang hanya berupa tema yang disiapkan pada mata pelajaran lain, sehingga hasilnya masih belum optimal. Sebagai negara yang memiliki potensi bencana sangat besar,

7 *Ibid.* h. 4

8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Di Daerah.

9 Karyono, 2010. *Pendidikan Mitigasi Bencana Dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Indonesia*. Dalam Halim, Muliha. (pyt.) Prosiding Makalah Seminar Nasional Pendidikan IPS. Bandung: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Indonesia perlu menerapkan kurikulum kebencanaan di lembaga-lembaga pendidikan agar anak didik memiliki pengetahuan dan wawasan tentang potensi bencana yang sangat rawan terjadi di dalam negeri khususnya. Pentingnya kurikulum kebencanaan adalah bagaimana siswa bisa terlibat langsung dalam penanganan bencana. Upaya ini sebaiknya dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, yaitu dengan menyiapkan kurikulum berdasarkan konsep dan pelaksanaannya, maupun kurikulum berdasarkan struktur dan materi pelajarannya. menumbuhkan kesadaran kesiapsiagaan bencana penting dilakukan sejak usia dini sehingga menanamkan di benak anak-anak bagaimana upaya menjaga keselamatan minimal dirinya sendiri dari dampak bencana. Hal itu akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelanjutan melalui kurikulum di sekolah-sekolah.<sup>10</sup>

Kurikulum bencana alam penting di negara rawan bencana termasuk Indonesia agar sejak dini anak-anak diberi pengetahuan soal kebencanaan, kurikulum bencana lebih efektif diingat dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar dan menengah ketimbang praktik yang justru mudah dilupakan.<sup>11</sup> Ini secara alami yang kita butuhkan masyarakat yang sudah paham, khususnya di daerah-daerah yang rawan bencana gempa bumi. Indonesia rawan bencana gempa dan tsunami serta meletusnya gunung api. Peta rawan tsunami dan gunung api sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga perlu edukasi. Oleh sebab itu, sejak masih sekolah seluruh masyarakat Indonesia bisa menyadari potensi bencana di wilayah masing-masing dan bisa segera menghindari bencana tersebut. Kalau sudah mendarah daging pengetahuan bencana maka harapan kita akibat bencana bisa diminimalisir.

Untuk mendapatkan kurikulum kebencanaan yang bermakna, kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang tepat. Ada sejumlah prinsip pengembangan kurikulum, di antaranya prinsip relevansi, efektivitas dan efisiensi, fleksibilitas.

Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, dan relevan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat.<sup>12</sup>

Prinsip efisiensi dan efektivitas terkait dengan biaya yang akan digunakan dan hasil yang akan dicapai dalam implementasi kurikulum. Sebuah kurikulum dikatakan memenuhi prinsip efisiensi apabila kurikulum tersebut memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak terlalu besar. Semakin sedikit/kecil waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan dalam mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, maka semakin efisien kurikulum tersebut. Namun penerapan prinsip ini jangan sampai mengabaikan prinsip efektivitas, karena seefisien apapun suatu kurikulum, tapi kalau tidak efektif, juga tidak ada artinya. Prinsip efektivitas terkait dengan besarnya atau banyaknya tujuan kurikulum yang dicapai. Semakin banyak tujuan pendidikan yang dicapai melalui proses pembelajaran (implementasi kurikulum), maka dikatakan kurikulum tersebut efektif.

Prinsip fleksibilitas terkait dengan keluwesan dalam tahap implementasi kurikulum. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel/luwes sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum tersebut dirancang. Bagi kurikulum yang memenuhi prinsip fleksibilitas perubahan/perbedaan kondisi tidak menghambat keberlangsungan pembelajaran. Dengan sedikit melakukan perubahan pada aspek media yang digunakan pembelajaran tetap dapat berlangsung namun tetap mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan.

Kurikulum dikatakan baik apabila mampu memfasilitasi dan menstimulasi potensi yang dimiliki siswa agar menjadi kompetensi yang dapat digunakan untuk membangun lingkungannya di era global. Kurikulum yang mampu menghasilkan siswa yang kreatif dan inovatif, mampu mengangkat potensi diri

10 Siti Irene Astuti dan Sudaryono. 2010. Peran Sekolah Dalam Pembelajaran Mitigasi Bencana. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*. Volume 1 No. 1/2010 h. 30-42.

11 Syafri Burhanuddin. 2010. *Kurikulum Bencana Alam untuk Tabun Ajaran 2010-2011*. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2013 dari: [www.poskotanews.com](http://www.poskotanews.com).

12 Khaerudin. 2009. *Pengembangan Kurikulum Berbasis Lokal Berwawasan Global*. Diakses pada tanggal 11 November 2013 dari: <http://ilmupendidikan.net>.

siswa dan daerahnya menjadi sesuatu yang bernilai tambah. Kurikulum yang mampu mendidik siswanya menghadapi tantangan globalisasi dan mengelolanya sedemikian rupa sehingga menjadi peluang untuk mendapatkan manfaat yang besar dari kondisi tersebut. Ini artinya sebuah kurikulum yang baik harus memperhatikan minimal tiga aspek, yaitu potensi siswa, kondisi lingkungan lokal, dan kondisi lingkungan global.<sup>13</sup>

Di samping bertujuan mengembangkan potensi siswa menjadi kompetensi, pendidikan juga harus mampu mendidik dan mempersiapkan siswa menjadi manusia yang mampu berkiprah di dalam masyarakatnya. Untuk itu, setiap individu harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang seluk-beluk daerah asal dan sekitarnya, agar mereka tahu betul akan sejarah, kebutuhan, dan karakteristik daerahnya. Kalau kita kaitkan dengan bencana, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, pola dan ragam bencana alam yang dihadapi juga berbeda-beda. Kurikulum bencana harus mengakomodasi kearifan lokal yang ada karena hampir seluruh wilayah Indonesia yang rawan bencana, sebagai upaya memberikan pendidikan yang tepat tentang menghadapi sekaligus menangani bencana. Di tengah keterbatasan teknologi dalam mitigasi bencana, kearifan lokal bisa menjadi alternatif dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Dalam khasanah pustaka pengurangan risiko bencana, ada empat argumen dasar yang mendukung pentingnya kearifan lokal. Pertama, berbagai praktik dan strategi spesifik masyarakat asli yang terkandung di dalam kearifan lokal, yang telah terbukti sangat berharga dalam menghadapi bencana-bencana alam, dapat ditransfer dan diadaptasi oleh komunitas-komunitas lain yang menghadapi situasi serupa. Kedua, pemaduan kearifan lokal ke dalam praktik dan kebijakan yang ada akan mendorong partisipasi masyarakat yang terkena bencana dan memberdayakan para anggota masyarakat untuk mengambil peran utama dalam semua kegiatan pengurangan risiko bencana. Ketiga, informasi yang terkandung di dalam kearifan lokal dapat membantu memberikan informasi yang berharga tentang konteks setempat.

Keempat, cara penyebarluasan kearifan lokal yang bersifat non formal memberi sebuah contoh yang baik untuk upaya pendidikan lain dalam hal pengurangan risiko bencana.

Masing-masing daerah memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang beragam dan berbeda bentuknya. Walaupun istilah yang digunakan berbeda dan cara-cara yang sudah menjadi tradisi tidak sama, semua ini merupakan potensi dalam membangun mitigasi bencana yang berbasis pada potensi kearifan lokal. Kearifan lokal dapat dijadikan suatu cara mengantisipasi bencana lebih awal. Kearifan lokal adalah salah satu langkah yang dapat dijadikan antisipasi bencana. Meskipun tanpa menggunakan rumus, ataupun teori dari akademis, alam telah mengajarkan manusia banyak hal. Kearifan lokal lebih efektif dalam membentuk kesadaran tentang kebencanaan dibanding imbauan aparat.<sup>14</sup> Edukasi tentang kebencanaan akan lebih cepat meresap jika dilakukan lewat tokoh masyarakat. Peninggalan berupa warisan kearifan lokal dari generasi sebelumnya sangat bijak jika diteruskan ke generasi seterusnya. Kearifan lokal itu merupakan pelajaran yang komprehensif dalam mendeteksi bencana di sebuah daerah. Dengan belajar seperti itu, kita lebih mengenal bencana yang sering terjadi di kawasan di mana kita berada. Karena itu kegiatan penanggulangan yang berdimensi mitigasi dan kesiapsiagaan yang menyentuh akses kearifan lokal, perlu di kembangkan.

Praktik kearifan lokal terbukti telah mengurangi dampak bencana alam, misalnya di tiga pulau di Sumatera, yakni Simeulue, Nias, dan Siberut. Dengan kebudayaan yang berbeda-beda, ketiga pulau itu, yang dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir mengalami bencana gempa bumi dan tsunami, telah mengangkat ke permukaan pelbagai praktik kearifan lokal yang sebelumnya luput dari perhatian masyarakat internasional yang peduli pada upaya pengurangan risiko bencana. Praktik yang mencakup antara lain seperti sarana komunikasi tradisional, metode pembangunan dan perencanaan hunian, serta upacara ritual yang terkait.

13 *Ibid.* h.12

14 Surono. 2013. *Kearifan Lokal, Senjata Tangguh Hadapi Bencana*. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2013 dari: [www.metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com).

Masyarakat Simeulue menggunakan kata *smong* untuk menyebut peristiwa tsunami. Adanya istilah lokal untuk menyebut peristiwa tsunami membuktikan bahwa masyarakat setempat memiliki pengetahuan hingga tingkat tertentu berkaitan dengan fenomena alam itu. Ketika Tsunami 2004 lalu korban yang jatuh di daerah tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan wilayah lain, yaitu sekitar 44 jiwa. Hal ini terjadi karena para orangtua di daerah tersebut telah mengetahui apa yang mereka anggap sebagai pertanda. Jika laut surut tidak seperti biasanya secara mendadak, kemudian banyak ikan yang menggelepar di garis pantai, maka akan terjadi bencana. Para tetua di sana kemudian memerintahkan agar penduduk Simeulue untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.<sup>15</sup>

*Smong* adalah kearifan lokal masyarakat di Pulau Simeulue dalam membaca fenomena alam pantai telah menyelamatkan banyak masyarakat dari bencana tsunami. Teriakan *smong* merupakan peringatan dini yang diartikan adanya situasi dimana air laut surut dan masyarakat harus lari ke bukit. Ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari leluhur belajar dari kejadian bencana yang pernah terjadi puluhan tahun lalu. *Smong* ini yang menyelamatkan masyarakat di pulau Simeulue padahal secara geografis letaknya sangat dekat dengan pusat gempa. *Smong* bagi masyarakat pulau Simeulue disosialisasikan turun temurun melalui dongeng dan legenda oleh tokoh masyarakat sehingga istilah ini jadi melekat dan membudaya di hati masyarakat pulau itu. Dengan pengetahuan yang dimiliki orang Simeulue banyak masyarakat pesisir pantai lainnya di Aceh terselamatkan saat tsunami terjadi.<sup>16</sup>

Penggalian terhadap kearifan lokal sangat diperlukan karena memberikan pemahaman dan panduan dalam lingkup tradisi lokal bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk pengetahuan ciri-ciri bencana dan larangan melakukan kegiatan yang merusak lingkungan atau keseimbangan ekosistem. Budaya mitigasi

berbasis kearifan lokal perlu dibangun sejak dini dalam diri setiap elemen masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Dalam hal ini, mitigasi dibangun bukan pula hanya sebagai sistem peringatan dini tetapi ia menjadi sebuah budaya dalam perilaku masyarakat. Langkah efektif yang bisa dilakukan antara lain adalah melalui pembekalan kepada masyarakat baik melalui pendidikan di bangku sekolah maupun pelatihan kepada masyarakat umum. Pendidikan di sekolah bagi siswa sangat strategis untuk menanamkan pengetahuan tentang kebencanaan sejak usia dini dan sosialisasi tentang kearifan lokal yang dimiliki daerah tersebut. Sekolah adalah sarana yang efektif, di mana dengan peran guru terhadap murid mampu mendorong terbangunnya budaya mitigasi dalam lingkup sekolah dan keluarga.

Berkaitan dengan kurikulum pendidikan kebencanaan berbasis kearifan lokal, Indonesia memerlukan kurikulum yang mengajarkan *local wisdom* atau kearifan lokal suatu daerah agar masyarakatnya tangguh menghadapi bencana.<sup>17</sup> Ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana itu diperoleh dari pemahaman secara menyeluruh tentang kearifan di daerahnya. ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana itu diperoleh dari pemahaman secara menyeluruh tentang kearifan di daerahnya. Sehingga dalam konteks mitigasi pengurangan risiko bencana, adanya kurikulum berbasis kearifan lokal akan dapat menjelaskan tentang hubungan manusia dengan alam dan budayanya. Karena masyarakat yang tangguh terhadap bencana adalah masyarakat yang toleran terhadap alamnya dan memahami alam yang ditempatinya.

### C. Penutup

Dilihat secara geologis, geomorfologis dan geografis, Indonesia merupakan negara rawan bencana, terutama bencana geologis dan hidro-meteorologis. Identifikasi karakteristik dan potensi bencana baik yang ada di Indonesia maupun lingkungan sekitar sangat diperlukan sebagai pengetahuan terhadap pengurangan risiko bencana. Selain itu, partisipasi masyarakat

15 Borokoa. 2010. *Membangun Budaya Mitigasi Bencana Berbasis Potensi Kearifan Lokal Nias*. Diakses pada tanggal 11 November 2013 dari: <http://niasonline.net>.

16 Respati Wikantiyoso, 2010. Mitigasi Bencana Di Perkotaan; Adaptasi Atau Antisipasi Perencanaan Dan Perancangan Kota? (Potensi Kearifan Lokal Dalam Perencanaan Dan Perancangan Kota Untuk Upaya Mitigasi Bencana). *Jurnal Local Wisdom*. Volume 2 No. 1/Januari 2010 H. 18-29.

untuk mengurangi dan menghindari risiko bencana penting dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat. Pentingnya kurikulum kebencanaan adalah bagaimana siswa dapat terlibat langsung dalam penanganan bencana. Upaya ini sebaiknya dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi, yaitu dengan menyiapkan kurikulum berdasarkan konsep dan pelaksanaannya, maupun kurikulum berdasarkan struktur dan materi pelajarannya. Kurikulum bencana harus mengakomodasi kearifan lokal yang ada karena hampir seluruh wilayah Indonesia yang rawan bencana, sebagai upaya memberikan pendidikan yang tepat tentang menghadapi sekaligus menangani bencana.

#### Daftar Pustaka

- Borokoa. 2010. *Membangun Budaya Mitigasi Bencana Berbasis Potensi Kearifan Lokal Nias*. Diakses pada 11 November 2013 dari: <http://niasonline.net>.
- D.S. Mileti & L.P. Gottschlich. 2001. Hazards and Sustainable Development in the United States. *Journal of Risk Management*, Vol. 3, No. 1. 2001.
- Karyono. 2010. *Pendidikan Mitigasi Bencana Dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Indonesia*. Dalam Halim, Muliha. (pyt.) Prosiding Makalah Seminar Nasional Pendidikan IPS. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi di Daerah.
- Khaerudin. 2009. *Pengembangan Kurikulum Berbasis Lokal Bermawasan Global*. Diakses pada 11 November 2013 dari: <http://ilmupendidikan.net>.
- M. Zein, A. 2010. Community Based Approach to Flood Hazard and Vulnerability Assessment in Flood Prone Area: A Case Study in Kelurahan Sewu, Surakarta City, Indonesia. *Thesis*, ITC, The Netherland.
- Respati Wikantiyoso. 2010. Mitigasi Bencana Di Perkotaan; Adaptasi atau Antisipasi Perencanaan dan Perancangan Kota? (Potensi Kearifan Lokal Dalam Perencanaan dan Perancangan Kota Untuk Upaya Mitigasi Bencana). *Jurnal Local Wisdom*. Volume 2 No. 1/Januari 2010.
- Siti Irene Astuti dan Sudaryono. 2010. Peran Sekolah dalam Pembelajaran Mitigasi Bencana. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*. Volume 1 No. 1/2010.
- Su Rito Hardoyo. 2011. *Strategi Adaptasi Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir Pasang Air Laut di Kota Pekalongan*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Surono. 2013. *Kearifan Lokal, Senjata Tangguh Hadapi Bencana*. Diakses pada 7 Oktober 2013 dari: [www.metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com).
- Suryanti, dkk. 2010. *Motivasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Multirisiko Bencana di Kawasan Kepesisiran Parangtritis dalam Penaksiran Multirisiko Bencana di Wilayah Kepesisiran Parangtritis, Yogyakarta*. Yogyakarta: PSBA Universitas Gadjah Mada.
- Syafri Burhanuddin. 2010. *Kurikulum Bencana Alam untuk Tahun Ajaran 2010-2011*. Diakses pada 7 Oktober 2013 dari: [www.poskotanews.com](http://www.poskotanews.com).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penaggulangan Bencana.